

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah

Ependi^{1*)}, Putu Tirta Sari Ningsih²⁾, Muhammad Gusvarizon³⁾, Cindy Ayu Mahendrawati⁴⁾

¹⁾³⁾ Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mohammad Husni Thamrin

²⁾⁴⁾ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mohammad Husni Thamrin

Correspondence Author: ependi71@yahoo.com, Jakarta, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i2.1869>

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Adapun faktor-faktor pendapatan daerah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian dilakukan terhadap 24 Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat sampel di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Laporan Realisasi APBD tahun 2015 hingga 2017 yang seluruhnya menyampaikan laporan kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Alat analisis yang digunakan penelitian adalah regresi linier berganda dengan uji signifikan parameter simultan (f) dan parsial (t). Berdasarkan koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa variable Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang paling besar terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien (+) 1.676, diikuti variabel PAD dan DAK dengan nilai regresi berturut-turut sebesar (+)1,539 dan (+)0,408. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) didapatkan bahwa nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap Belanja Daerah (BD). Hasil analisa koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel independen mampu memberikan kontribusi sebesar 97,8% sedangkan 2,2% dapat disumbangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Daerah (BD)

Abstract

This research discusses the influence of regional income on regional spending. The regional income factors used in this research include Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK). The research was conducted on 24 regencies/cities that met the sample requirements in West Java Province. This research uses secondary data obtained from the 2015 to 2017 APBD Realization Report, all of which submitted reports to the website of the Director General of Regional Financial Balance. The data collection method used is documentation. The analytical tool used in this research is multiple linear regression with simultaneous (f) and partial (t) significant parameter tests. Based on the regression coefficient, it can be concluded that the General Allocation Fund (DAU) variable has the greatest influence on Regional Expenditures with a coefficient value of (+) 1,676, followed by the PAD and DAK variables with regression values of (+) 1,539 and (+) respectively. 0.408. Based on the results of the simultaneous test (F test), it was found that the F significance value was $0.000 < 0.05$. This shows that the independent variables in this research, namely Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) have a joint or simultaneous effect on Regional Expenditures (BD). The results of the analysis of the coefficient of determination (R^2) show that the independent variable is able to contribute 97.8%, while 2.2% can be contributed by other variables not included in this research.

Keywords: Original Regional Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Regional Expenditures (BD)

PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah yang telah membawa perubahan cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah. Diharapkan melalui kebijakan yang sudah berjalan beberapa tahun ini dapat membantu proses reformasi pada tingkat lokal dan memberi kebebasan terutama pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal sehingga tercipta pembangunan yang baru. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan lebih baik lagi karena pemerintah lokal dapat lebih fokus menjalankan pemerintahannya untuk memajukan sarana, infrastruktur bahkan sumber daya alam dan manusia lewat kebijakan otonomi daerah.

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia “Merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah”.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang

semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah daerah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di satu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan di sisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan sumber daya alam yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan dana alokasi umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No. 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Undang-undang No. 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Khusus (DAK) ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. (Nordawan, dkk, 2007)

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.

Provinsi Jawa Barat adalah Provinsi yang berdekatan dengan ibu kota Jakarta yang pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonominya digolongkan berkembang cukup baik. Selain itu, Jawa Barat juga merupakan Provinsi yang memiliki tingkat industri yang tinggi sehingga akan menciptakan masyarakat yang produktif dan Jawa Barat pun merupakan Provinsi yang kaya akan tempat wisatanya. Banyaknya pengunjung yang berdatangan untuk mengunjungi tempat wisata akan memberikan dampak pula terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan keadaan masyarakatnya yang produktif dan banyaknya tempat wisata, secara otomatis maka pemerintah daerahpun harus menyediakan fasilitas yang memperlancar dan mempermudah kegiatan-kegiatan yang terjadi di daerah Jawa Barat. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperhitungkan hal-hal tersebut dalam pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan analisis terhadap penelitian terdahulu maka perlu untuk melakukan penelitian yang membahas “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah” (Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017).

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian, yang menjadi objek penelitian adalah Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah pada Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2017. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2017 yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah serta kepustakaan dan observasi. Metode kepustakaan yaitu, membaca dan mempelajari segala jenis literature yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan metode studi observasi yaitu suatu cara memperoleh data dengan menggunakan dokumentasi yang berdasarkan pada Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2017 dalam website www.depkeu.djpk.go.id.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2017 yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dalam website www.depkeu.djpk.go.id. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil secara langsung dari sumber objek yang akan diteliti. Data sekunder dapat berupa catatan, atau kumpulan laporan historis yang telah disusun. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2017 yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek, atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pada Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah cara menentukan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah dibuat terhadap objek yang akan

diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Kabupaten / Kota yang menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 - 2017.
2. Kabupaten/Kota yang mencantumkan data-data mengenai PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah pada Laporan Realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini.

Jumlah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan Laporan Realisasi APBD Tahun 2015 hingga 2017 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 24 data.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah variabel belanja daerah.

Variabel Independen (Variabel Bebas) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Variabel independen tersebut akan dianalisis pengaruhnya terhadap Belanja Daerah sebagai Variabel Dependen (Variabel Tak Bebas).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU Nomor 32 Tahun 2004). Adapun rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah:

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Halim, 2007). Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dengan melihat dari dana perimbangan yang ada

di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Provinsi Provinsi Jawa Barat.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. (Basuki, 2008). Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh dengan melihat dari dana perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten / Kota khususnya Provinsi Jawa Barat.

4. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 32 Tahun 2004). Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. (Nordawan, dkk, 2007). Menurut situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah rumus untuk menghitung alokasi belanja daerah yaitu:

$$ABD = BTL \text{ (belanja pegawai + belanja bunga + belanja subsidi + belanja hibah + belanja bantuan sosial + belanja bagi hasil + bantuan keuangan + belanja tidak terduga.)} \\ + BL \text{ (belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal).}$$

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. H₀ : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
Ha : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
2. H₀ : Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
Ha : Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
3. H₀ : Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja daerah.
Ha : Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015 sampai dengan 2017 yang diperoleh melalui melalui situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari sumber tersebut diperoleh data mengenai PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar sampel yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat	27
2	Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi APBD berdasarkan SAP	(3)
Kabupaten/Kota yang digunakan dalam sampel		24
Tahun Pengamatan		3
Jumlah Penelitian		72

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan kriteria diatas maka diperoleh sampel dalam penelitian ini yaitu 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 24 Kabupaten/Kota dengan periode penelitian yaitu 3 tahun pengamatan, sehingga diperoleh sebanyak $24 \times 3 = 72$ data pengamatan (perkalian antara jumlah sampel dengan jumlah tahun dalam penelitian). Data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 24 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Kabupaten / Kota yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Kabupaten	No	Kota
1	Bandung	1	Bandung
2	Bandung Barat	2	Banjar
3	Bogor	3	Bekasi
4	Ciamis	4	Bogor
5	Cianjur	5	Cimahi
6	Cirebon	6	Cirebon
7	Indramayu	7	Sukabumi
8	Karawang	8	Tasikmalaya
9	Kuningan		
10	Majalengka		
11	Pangandaran		
12	Purwakarta		
13	Subang		
14	Sukabumi		
15	Sumedang		
16	Tasikmalaya		

Dari hasil pengumpulan data sekunder diperoleh statistik deskriptif pada variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
BD	2867991.86	1563921.903	72
PAD	593637.15	628568.445	72
DAU	1165190.79	454248.489	72
DAK	281229.79	231597.637	72

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan *software* SPSS 22

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independent dengan variabel dependen. Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Dari analisis yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-112861.614	77180.552	
PAD	1.539	.051	.619
DAU	1.676	.078	.487
DAK	.408	.140	.060

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan software SPSS

Dari tabel 4 di atas diperoleh persamaan regresi variabel PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

$$BD = -112861,614 + 1,539PAD + 1,676DAU + 0,408DAK + e$$

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Hipotesis ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak. Sedangkan jika nilai signifikan < 0,05, maka hipotesis diterima. Hasil uji F dapat dilihat pada hasil olahan SPSS 20.0 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1699321539	3	56644051325	1034.506	.000 ^b
	77056.660		685.550		
Residual	3723318122	68	54754678265		
	041.952		.323		
Total	1736554720	71			
	99098.500				

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) yang dinyatakan dalam tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-112861.614	77180.552		-1.462	.148
PAD	1.539	.051	.619	30.045	.000
DAU	1.676	.078	.487	21.450	.000
DAK	.408	.140	.060	2.906	.005

a. Dependent Variable: BD

Data sekunder yang diolah dengan *software* SPSS 20.0

Uji signifikansi secara parsial atau uji t bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi secara parsial variabel independen berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada uji t, untuk menguji hipotesis ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Sedangkan jika nilai signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada hasil olahan SPSS 20.0 sebagaimana terlihat pada tabel 6.

Berdasarkan koefisien regresi pada tabel 6 dapat disimpulkan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh yang paling besar terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien beta regresi sebesar (+)1,676, diikuti variabel PAD dan DAK dengan nilai beta regresi berturut-turut sebesar (+)1,539 dan (+)0,408.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 besarnya

antara $0 < R^2 < 1$, dimana semakin mendekati 1 maka dapat dinyatakan model semakin baik. Dalam perhitungan statistik ini nilai R^2 yang digunakan adalah Adjusted R Square yang merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penambahan suatu variabel independen ke dalam suatu persamaan regresi. Hal itu karena nilai R^2 lebih tepat untuk digunakan pada analisis regresi linear sederhana dimana hanya terdapat satu variabel independen saja. Untuk analisis regresi linear berganda yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square* karena telah dibebaskan dari pengaruh derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang berarti nilai tersebut telah benar-benar menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.989 ^a	.979	.978	233997.176	2.047

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Berdasarkan tabel 7 diperoleh nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0.978 menunjukkan bahwa kemampuan PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah sebesar 97,8% sedangkan sisanya yaitu 2,2% dijelaskan oleh variable lain diluar metode penelitian. Karena nilai kolerasi ganda sebesar 0.989 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah sebesar 98,9%.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian dari bab–bab sebelumnya dan pembahasan yang telah disajikan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Jawa Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah (BD) adalah sebagai berikut:

$$BD = -112861,614 + 1,539PAD + 1,676DAU + 0,408DAK + e$$

Berdasarkan koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa variable Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang paling besar terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien (+) 1.676, diikuti variabel PAD dan DAK dengan nilai beta regresi berturut-turut sebesar (+)1,539 dan (+)0,408.

2. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) didapatkan bahwa nilai signifikansi F sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap Belanja Daerah (BD).
3. Berdasarkan penelitian diperoleh nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0.978 menunjukkan bahwa kemampuan PAD, DAU, dan DAK untuk menentukan Belanja Daerah sebesar 97,8% sedangkan sisanya yaitu 2,2% dijelaskan oleh variable lain diluar metode penelitian.

Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sampel Kabupaten/Kota di Jawa Barat seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, dan Kota Depok. Disarankan juga untuk mengambil periode waktu penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti Dana Bagi Hasil (DBH), dan jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah.
3. Untuk meningkatkan alokasi Belanja Daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pemerintah Daerah agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus semaksimal mungkin serta memaksimalkan dana yang didapat untuk kepentingan daerahnya.

REFERENSI

- Abdullah, Sukriy dan Halim Abdullah. (2009). Pengaruh Dana Alokasi Umum, (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta. Hal 1140-1159. Akmenipa UPY.
- Basuki. (2008). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 1. Yogyakarta: Kreasi
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Provinsi Jawa dan Bali. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol 4 No.2.
- Edison, Henri. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir. Tesis pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (Dipublikasikan). Medan.
- Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate program SPSS. Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro
- Halim, Abdul. (2005). Analisis Investasi. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Kurniawati, Fransisca Roosiana. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten Di Indonesia. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (Dipublikasikan). Surakarta.
- Lambut Kristanto Adventinus dan Budiarmo Novi. (2013). Flypaper Effect Pada DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*. Vol 2, No. 1.
- Maimunah, Mutiara. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prakosa, Bambang. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. *Jurnal: JAAI* Vol. 8 No. 2 Desember 2004. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

- Renyowijoyo, Muindro. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi 1. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Saptaningsih, Sumarmi. (2008). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2002 – 2007*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Sari, Noni Puspita dan Yahya Idhar. (2009). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung pada Pemerintahan / Kota di Propinsi Riau*. *Jurnal Akuntansi* 42. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Soetjipto, R. Kery dan Sudikdiono. (2011). *Akuntansi Pemerintahan RI: Reformasi Keuangan Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sujarweni, V Wiratna. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Unun, Anggraeni Dian dan Yohanes. (2010). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Pustaka Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. *SOLUSI* Vol 9, No.1.
- UU RI. (1999). Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pengembangan Otonomi Pada Daerah Kabupaten dan Kota Diselenggarakan Dengan Memperhatikan Prinsip-prinsip Demokrasi.
- UU RI. (1999). Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU RI. (2004). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU RI. (2004). Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- UU RI. (2005). Pasal 1 Butir 5 Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah.
- Yuriko, Ferdian. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah. (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota di Sumatera Barat)*.
- Data Keuangan Daerah, www.djpk.depkeu.go.id